LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS SOSIAL
KOTA SIBOLGA

JL. Pasar Inpres No. 11
Sibolga Selatan
Telp./Fax.(0631)3270422 Sibolga - 225233

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap lembaga pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan itu, Dinas Sosial Kota Sibolga sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota Sibolga juga diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban Pimpinan Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Pada akhirnya Laporan Kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga merupakan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sibolga yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

I.2. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2019 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Dipindai dengan CamScanner

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.3. GAMBARAN UMUM OPD

I.3.1. VISI DAN MISI

Visi Walikota Sibolga yang hendak dicapai pada masa jabatan periode 2021–2026 adalah **"Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur"**. Visi tersebut didukung melalui 5 misi Wali Kota Sibolga yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Good Governance dengantrasparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata raung yang berwawaşan kota pintar (Smart City).
4. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan guru.
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Dipindai dengan CamScanner

I.3.2. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 tahunan. Atau dengan kata lain harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.Keterkaitan Misi Walikota Sibolga dengan tujuan Dinas Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Good Governance dengantrasparan dan akuntabel.

Tujuan :

1. Menciptakan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar.

Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Tujuan :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

I.3.3. SASARAN

Dalam rangka operasionalisasi tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran Dinas Sosial Kota Sibolga sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Tersampaikannya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan tepat waktu.
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik untuk kelancaran kegiatan perkantoran.
4. Meningkatnya kehandalan, integritas serta disiplin aparatur dalam bekerja.
5. Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencanakepada PMKS/PPKS.
6. Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial.
7. Tersedianya data yang akurat bidang sosial.

Dipindai dengan CamScanner

8. Terkelolanya Taman Makam Pahlawan dalam rangka melestarikan nilai-nilai dan semangat kepahlawanan.

I.3.4. STRATEGI

Strategi organisasi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang didinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang, meliputi kebijakan program dan kegiatan manajemen untuk melaksanakan misi organisasi.

Sebelum menetapkan strategi, perlu dianalisa lingkungan strategi organisasi dengan menggunakan SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). Lingkungan Strategi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Sibolga meliputi:

A. STRENGHTS (KEKUATAN) :

1. Adanya sturuktur organisasi yang jelas dan baik.
2. Tersedianya anggaran.
3. Adanya peraturan pendukung operasional pelaksanaan tugas.

B. WEAKNESS (KELEMAHAN) :

1. Personil kurang handal dalam melaksanakan tugas.
2. Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai.
3. Kerjasama antar bidang dalam OPD belum maksimal.

C. OPPORTUNITIES (PELUANG) :

1. Adanya dukungan dari pemerintah Provinsi dan Pusat.
2. Adanya kesempatan mengikuti Diklat, Pelatihan, dll.
3. Adanya penduduk dan wilayah kerja.

D. THREATS (ANCAMAN) :

1. Wilayah Kota Sibolga yang terbatas dan kondisi alam yang berpotensi rawan bencana.
2. Kondisi perekonomian yang kurang baik saat ini menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan.
3. Banyaknya pendatang dari daerah lain yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai SDM memadai sehingga menyebabkan bertambahnya masalah-masalah sosial.

Dipindai dengan CamScanner

Setelah menganalisa lingkungan strategis organisasi Dinas Sosial Kota Sibolga, maka dapat dirumuskan strategi organisasi sebagai berikut:

a. Memanfatkan kesempatan mengikuti Diklat dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kekompakan personil Dinas Sosial Kota Sibolga.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Meningkatkan pelayanan bidang sosial kepada masyarakaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
d. Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga.
e. Aktif dalam memperoleh pendanaan tambahan dari Pusat dan Provinsi.

I.3.5. KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksana program/kegiatan guna tercapainya sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial Kota Sibolga diperlukan kebijakan-kebijakan umum dan program pembangunan urusan sosial sebagai pedoman bagi OPD dalam merumuskan program kegiatan sesuai dengan fungsinya. Adapun Kebijakan umum Dinas Sosial antara lain:

1. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM Aparatur serta pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor;
2. Peningkatan capaian pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana;
3. Peningkatan capaian pengelolaan Taman Makam Pahlawan
4. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan terarah di lingkungan pemerintah Kota Sibolga dengan terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah Kota Sibolga.

Dipindai dengan CamScanner

I.3.6. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga dan Dinas Sosial Tipe C Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan sesuai Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Sibolga, maka Dinas Sosial terpisah dari Tenaga Kerja sejak Januari 2017.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang sosial dengan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan program dan kebijaksanaan teknis di bidang sosial.
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum serta teknis di bidang sosial.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan bidang sosial sesuai Ketetapan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan pemberdayaan, bantuan sosial, rehabilitasi, serta kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Mengelola urusan ketatausahaan Dinas.
6. Mengadakan koordinasi tugas dengan Instansi dan Lembaga terkait lainnya.
7. Melakukan evaluasi atas hasil penyelenggaraan tugas dalam bidang sosial.

Dinas Sosial Kota Sibolga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan tingkat jabatan Eselon II/b dan dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Eselon III/a, 2 (dua) orang Pejabat Eselon III/b dan 8 (delapan) orang Pejabat Eselon IV/a. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Sibolga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Sibolga

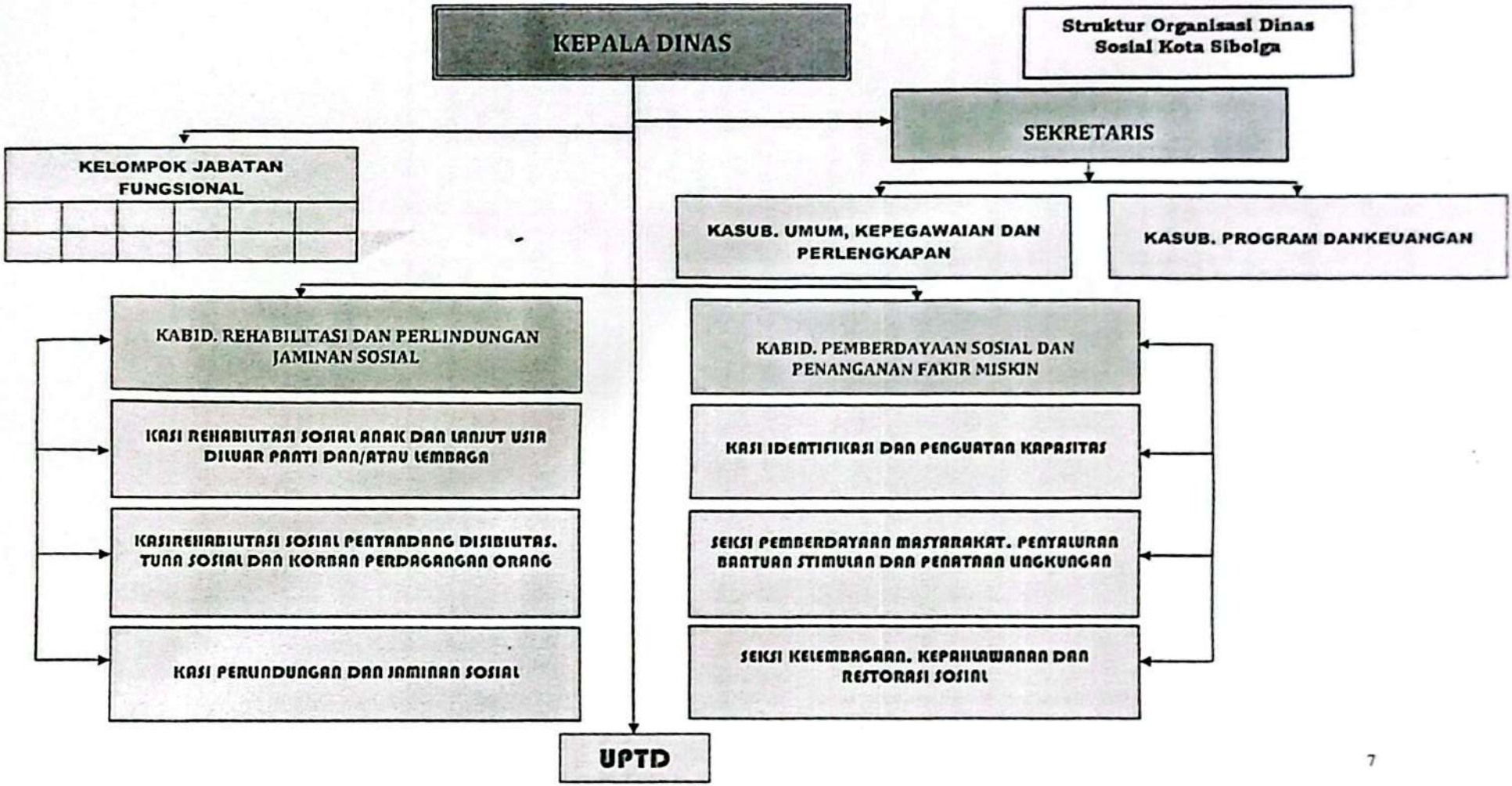

Dipindai dengan CamScanner

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Seluruh Pegawai pada Dinas Sosial Kota Sibolga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) baik ASN maupun Non ASN dengan keadaan sampai dengan Desember 2023 sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	24
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	36
3.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	4
4.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	21
5.	Pendamping Rehabilitasi Sosial	3
6.	Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)	1
7.	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	13

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Sibolga berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pria	14
2.	Wanita	10
	JUMLAH	24

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Sibolga berdasarkan Pangkat/Golongan RuangTahun 2024

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	1
4.	Penata Tk. I (III/d)	6
5.	Penata (III/c)	5
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
7.	Penata Muda (III/a)	2
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	2
9.	Golongan IX	2
	JUMLAH	24

Dipindai dengan CamScanner

I.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Sibolga ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai organisasi (visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan) Dinas Sosial Kota Sibolga dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB. II PERENCANAANKINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil kemudian.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB. IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1. SASARAN DAN INDIKATOR

Dalam rangka operasionalisasi tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran dan indikatornya sebagai berikut :

Tujuan 1 : **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**

Indikator Tujuan 1 : Capaian hasil yang diperoleh dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar.	Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2.Tersampaikannya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan tepat waktu.	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen laporan OPD pada setiap triwulan dan semester dengan baik dan sesuai rencana.
3.Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang lengkap untuk kelancaran kegiatan perkantoran.	Capaian pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.Meningkatnya kehandalan, integritas serta disiplin aparatur dalam bekerja.	Jumlah aparatur yang terfasilitasi untuk mengikuti diklat/kursus keterampilan serta memperoleh pakaian dinas yang lengkap.

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan 2 : **Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.**

Indikator Tujuan 2 : PMKS/PPKS yang meningkat kesejahteraannya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencanakepada PMKS/PPKS.	1. PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial. 2. PMKS/PPKS yang tertangani 3. PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 4. Kelompok PMKS/PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 5. Panti sosial kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 7. Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa Tanggap darurat. 8. Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. 9. Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima Jaminan Sosial. 10. Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti
2.Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan
3. Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan	Jumlah data/laporan bidang sosial.

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
pembangunan bidang sosial.	

Tujuan 3 : **Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**

Indikator Tujuan 3 : Capaian hasil yang diperoleh dengan adanya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terkelolanya Taman Makam Pahlawan dalam rangka melestarikan nilai-nilai dan semangat kepahlawanan.	Jumlah Makam Pahlawan yang bersih dan terawat.

II.2. PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati seharusnya tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Sibolga dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

III.1.1. Kerangka Kinerja

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik.

1. Indikator kinerja kualitatif.

   Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif. Ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, misalnya tentang kepuasan pengguna jasa.

2. Indikator kinerja kuantitatif terdiri dari :

   a. Indikator kinerja kuantitatif absolute :

      Indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolute.

   b. Indikator kinerja kuantitatif persentase :

Dipindai dengan CamScanner

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan persentase suatu porsi tertentu.

c. Indikator kinerja kuantitatif rasio :
Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan antara sesuatu dengan yang lain.

d. Indikator kinerja kuantitatif indeks :
Indikator Kinerja Utama yang dinyatakan dengan menunjuk indeks.

Penjelasan dari Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   Indikator ini adalah untuk melihat sejauhmana capaian pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerahselama satu tahun yang evaluasi.
2. Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan OPD lengkap dan disampaikan sesuai rencana.
   Indikator ini adalah untuk melihat jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang telah dikerjakan oleh OPD. Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, Laporan SPM, LPT, LKPJ, LKIP, dan Laporan Keuangan selama satu tahun yang evaluasi.
3. Capaian pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Indikator ini adalah untuk melihat sejauhmana capaian pelaksanaan kegiatanPengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama satu tahun yang evaluasi.
4. Jumlah aparatur yang terfasilitasi untuk mengikuti diklat/kursus keterampilan serta memperoleh pakaian dinas yang lengkap.

Dipindai dengan CamScanner

Indikator ini adalah untuk melihat Jumlah aparatur yang terfasilitasi untuk mengikuti diklat/kursus keterampilan serta memperoleh pakaian dinas yang lengkapselama satu tahun yang evaluasi.

5. Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial.
   Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun bantuan sosial lainnya selama satu tahun yang di evaluasi.
6. Persentase PMKS/PPKS yang tertangani.
   Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana PMKS/PPKS yang dapat ditangani oleh Dinas Sosial Kota Sibolga melalui pemberian bantuan sosial dan pelayanan sosial lainnya selama satu tahun yang di evaluasi.
7. Persentase PMKS/PPKS yang bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
   Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar selama satu tahun yang di evaluasi.
8. Persentase Kelompok PMKS/PPKSyang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
   Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana kelompok PMKS/PPKS yang yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
9. Persentase Panti Sosial kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
   Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana Panti sosial kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
10. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
    Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Dipindai dengan CamScanner

11. Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa Tanggap Darurat.

    Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana Dinas Sosial Kota Sibolga memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama masa tanggap darurat.

12. Persentase Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

    Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana Dinas Sosial Kota Sibolga mengevakuasi korban bencana dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

13. Persentase Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminanSosial.

    Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminanSosial selama satu tahun yang dievaluasi.

14. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti.

    Indikator ini adalah untuk melihat sejauh mana Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti selama satu tahun yang dievaluasi.

15. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan

    Indikator ini adalah untuk melihat JumlahPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan selama satu tahun yang dievaluasi.

16. Jumlah data/laporan bidang sosial.

    Indikator ini adalah untuk melihat Jumlah data/laporan bidang sosial yang dikerjakan selama satu tahun yang dievaluasi.

17. Jumlah Makam Pahlawan yang bersih dan terawat.

    Indikator ini adalah untuk melihat Jumlah Makam Pahlawan yang bersih dan terawat selama satu tahun yang dievaluasi.

Dipindai dengan CamScanner

Selama periode RENSTRA Dinas Sosial Tahun 2021-2026, terdapat 3 Tujuan, 8 Sasaran dan 17 indikator kinerja yang harus dievaluasi setiap tahunnya. Namun sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permensos RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka indikator untuk poin nomor 8,9 dan 10 diatas bukan lagi menjadi fokus dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Untuk itu Dinas Sosial menargetkan 0% selama Tahun RENSTRA 2021-2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA FEBRUARI 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	1.Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar.	Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	0%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
		2.Tersampaikannya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan tepat waktu.	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen laporan OPD pada setiap triwulan dan semester dengan baik dan sesuai rencana.	0 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	40 dokumen
		3.Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang lengkap untuk kelancaran kegiatan perkantoran.	Capaian pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	80%	80%	100%	100%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA FEBRUARI 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
		4. Meningkatnya kehandalan, integritas serta disiplin aparatur dalam bekerja.	Jumlah aparatur yang terfasilitasi untuk mengikuti diklat/kursus keterampilan serta memperoleh pakaian dinas yang lengkap.	0 orang	70 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	400 Orang
2.	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	1. Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS.	1. PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial.	0%	20%	20%	40%	50%	60%	70%
			2. PMKS/PPKS yang tertangani.							
			3. PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan. kebutuhan dasar.	0%	20%	20%	40%	50%	60%	70%
			4. Kelompok PMKS/PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	0%	20%	20%	40%	50%	60%	70%
			5. Panti sosial kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Dipindai dengan CamScanner

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA FEBRUARI 2025
					2021	2022	2023	2024	2025	
			6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.							
			7. Korban bencana kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.							
			8. Korban bencana kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			9. Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensian menerima jaminan sosial.							
			10. Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				0%	0%	80%	80%	80%	80%	80%

Dipindai dengan CamScanner

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA FEBRUARI 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
			darurat.	0%	0%	80%	80%	80%	80%	80%
			8. Korban bencana kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	0%	0%	80%	80%	80%	80%	80%
			9. Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensian menerima jaminan sosial.	0%	0%	10%	20%	40%	40%	50%
			10. Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	0%	0%	10%	20%	40%	40%	50%

Dipindai dengan CamScanner

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA FEBRUARI 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
		2 Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial.	1. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan	0 orang	0 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	60 orang
		3. Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang sosial	1. Jumlah data/laporan bidang sosial	0 dokumen	2 doku men	2 doku men	2 doku men	2 doku men	2 doku men	10 doku men
3	Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1.Terkelolanya Taman Makam Pahlawan dalam rangka melestarikan nilai-nilai dan semangat kepahlawanan	1. Jumlah Makam Pahlawan yang bersih dan terawat.	0 Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga	1 Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga	1 Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga	1 Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga	1 Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga	1 Taman Makam Pahlaw an Kota Sibolga	1 Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga

Dipindai dengan CamScanner

III.1.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini perlu dilakukan pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Untuk kriteria penilaian dalam realisasi kinerja organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Cukup Rendah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dipindai dengan CamScanner

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis pencapaian kinerja dari program-program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Sibolga dapat dilihat pada uraian berikut:

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas perjanjian kinerja Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

TABEL 3.1.1
MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang yang tertangani	60	42	64,60	Dinas Sosial
		Persentase korban bencana yang tertangani dan mendapat perlindungan sosial	80	4	2,2	Dinas Sosial
2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	73,81	22,48	30,45	Dinas Sosial

Dipindai dengan CamScanner

3	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50	22,48	30,45	Dinas Sosial
4	Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan	20	0	0	Dinas Sosial
5	Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang sosial	Data perencanaan Bidang Sosial dan PPKS/PMKS yang tertangani	2	2	100	Dinas Sosial

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat hasil dari pengukuran kinerja atas capaian perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS capian kinerja masih 64,60 dalam hal ini masih kriteria rendah dan capaian kinerja masih 2,2 dalam hal ini masih kriteria cukup rendah.
2. Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi capian kinerja masih 30,45 dalam hal ini masih kriteria cukup rendah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kantor capian kinerja masih 30,45 dalam hal ini masih kriteria cukup rendah.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial capian kinerja masih 0 (belum adanya realisasi) dalam hal ini masih kriteria cukup rendah.
5. Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang social capian kinerja 100 dalam hal ini sudah kriteria sangat tinggi.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya atau tahun 2022 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 3.1.2
MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang yang tertangani	76	6,6	50	47	94
		Persentase korban bencana yang tertangani dan mendapat perlindungan sosial	100	80	80	79	98.75
2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	100	100	81,11	100	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100	88,19	100	100
4	Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan	0	20	20	0	0
5	Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang sosial	Data perencanaan Bidang Sosial dan PPKS/PMKS yang tertangani	2	2	2	2	100

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat hasil dari pengukuran kinerja atas capaian perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS capian kinerja masih 94 dalam hal ini sudah kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja masih 98,75 dalam hal ini sudah kriteria sangat tinggi.
2. Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi capian kinerja 100 dalam hal ini sudah kriteria sangat tingggi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kantor capian kinerja 100 dalam hal ini sudah kriteria sangat tinggi.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial capian kinerja masih 0 (tidak ada realisasi) dalam hal ini masih kriteria cukup rendah.
5. Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang social capian kinerja 100 dalam hal ini masih kriteria sangat tinggi.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kota Sibolga Periode 2021-2026 diuraikan pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 3.1.3
MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (20...)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang yang tertangani	47	70	148.9362
		Persentase korban bencana yang tertangani dan mendapat perlindungan sosial	79	80	101.2658
2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	81,11	100	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,19	100	100
4	Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan	0	60	0
5	Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang sosial	Data perencanaan Bidang Sosial dan PPKS/PMKS yang tertangani	2	2	100

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target akhir renstra tahun 2024 adalah 91,70%, dalam hal ini sudah kriteria sangat tinggi.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 3.1.4
MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahunan	Standar Nasional/ Provinsi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang yang tertangani	47	tidak ada	tidak ada
		Persentase korban bencana yang tertangani dan mendapat perlindungan sosial	79	tidak ada	tidak ada
2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	81,11	tidak ada	tidak ada
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,19	tidak ada	tidak ada

Dipindai dengan CamScanner

4	Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan	0	tidak ada	tidak ada
5	Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang sosial	Data perencanaan Bidang Sosial dan PPKS/PMKS yang tertangani	2	tidak ada	tidak ada

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat, analisi capaian kinerja masing-masing indikator dengan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional yaitlu tidak ada.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 3.1.5
ANALISIS PEYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang yang tertangani	50	47	94	Terpenuhinya dan tertanganinya pmks/ppks	Mempertahankan yang sudah tercipta/terbentuk

Dipindai dengan CamScanner

		Persentase korban bencana yang tertangani dan mendapat perlindungan sosial	20	79	395	Terpenuhinya dan tertanganinya pmks/ppks	Mempertahankan yang sudah tercipta/terbentu
2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	81,11	81,11	100	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik	Mempertahankan yang sudah tercipta/terbentu
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,19	88,19	100	Terciptanya pelayanan kantor yang prima	Mempertahankan yang sudah tercipta/terbentuk
4	Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan	20	0	0	Tidak Terciptanya dan terbinanya psks dikarenakan tidak adanya realisasi/pengurangan anggaran	Akan lebih mengupayakan psks yang terlatih dan terbina
5	Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang sosial	Data perencanaan Bidang Sosial dan PPKS/PMKS yang tertangani	2	2	100	Tersusunnya data perencanaan bidang social dan data ppks/pmks	Mempertahankan yang sudah tercipta/terbentu

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat, analisis capaian kinerja masing-masing indikator sudah sangat tercapai/berhasil namum masih ada yang belum tercapai/blm berhasil dikarenakan tidak terserapnya anggaran (pengurangan anggaran).

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Hasil pengukuran atas perjanjian kinerja Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2024 dan efisiensi terhadap pengunaan sumber daya (anggaran) yang ada diuraikan pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 3.1.6
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp..)	Realisasi (Rp..)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang yang tertangani	50	47	94	384,432,820	270,891,600	70	74,46
		Persentase korban bencana yang tertangani dan mendapat perlindungan sosial	20	79	395	279,387,824	195,166,000	70	17,72
2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	81,11	81,11	100	4,182,922,066	3,544,484,945	85	85

Dipindai dengan CamScanner

3	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,19	88,19	100	4,182,922,066	3,544,484,945	85	85
4	Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan	20	0	0	238,481,997	217,080,380	91	0
5	Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang sosial	Data perencanaan Bidang Sosial dan PPKS/PMKS yang tertangani	2	2	100	1,125,124,100	629,910,900	56	56

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat analisis atas efisiensi penggunaan sember daya adalah 53,03%, dalam hal ini masih kriteria sangat rendah

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja diuraikan pada tabel berikut

TABEL 3.1.7
ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pulihnya fungsi sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana kepada PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang yang tertangani	94	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS/PPKS yang yang tertangani	94	Menunjang	Sudah mencapai target
		Persentase korban bencana yang tertangani dan mendapat perlindungan sosial	79	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani dan mendapat perlindungan sosial	79	Menunjang	Sudah mencapai target
2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan hasil evaluasi SAKIP	98	Menunjang	Sudah mencapai target

Dipindai dengan CamScanner

				Kabupaten/Kota				
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	Menunjang	Sudah mencapai target
4	Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan	0	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh pelatihan	0	Menunjang	Tidak mencapai target dikarenakan tidak adanya psks yang dilatih/dibina dikarenakan pengurangan anggaran
5	Meningkatnya pengelolaan data yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan bidang sosial	Data perencanaan Bidang Sosial dan PPKS/PMKS yang tertangani	98	Program Pemberdayaan Sosial	Data perencanaan Bidang Sosial dan PPKS/PMKS yang tertangani	98	Menunjang	Sudah mencapai target

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah 77,00%, dalam hal ini masih kriteria sangat rendah.

III.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Sosial Kota Sibolga didukung dengan dana APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp.6.210.348.807,00 (enam milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah), dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.4.857.533.825,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp.1.352.814.982,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 78%. Adapun alokasi dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA				
		ANGGARAN AWAL (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SELISIH ANGGARAN (Rp.)	Persentase (%)
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	4.690.631.270,00	4.182.922.068,00	3.544.424.945,00	638.437.121,00	85%
1	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3.332.156.595,00	2.997.917.730,00	2.401.493.294,00	596.424.436,00	80%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.332.156.595,00	2.997.917.730,00	2.401.493.294,0	596.424.436,00	80%
2	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	298.172.625,00	199.477.386,00	186.021.150,00	13.456.236,00	93%

Dipindai dengan CamScanner

a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.983.300,00	3.338.200,00	3.333.500,00	4.700,00	100%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.743.900,00	25.409.000,00	25.203.000,00	206.000,00	99%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.030.800,00	3.362.900,00	3.357.000,00	5.900,00	100%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.379.625,00	12.981.588,00	12.739.500,00	242.088,00	98%
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.970.000,00	12.091.500,00	11.825.600,00	265.900,00	98%
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.594.000,00	6.427.200,00	6.420.000,00	7.200,00	100%
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.471.000,00	135.867.000,00	123.142.550,00	12.724.450,00	91%
4	*Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah*	885.993.950,00	860.673.950,00	835.047.951,00	25.625.999,00	97%
a	Penyediaan Surat menyurat Daerah	5.790.000,00	3.870.000,00	3.800.000,00	70.000,00	98%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.203.950,00	107.203.950,00	83.432.951,00	23.770.999,00	78%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	773.000.000,00	749.600.000,00	747.815.000,00	1.785.000,00	100%
5	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	174.308.100,00	124.853.000,00	121.922.550,00	2.930.450,00	98%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	49.320.000,00	41.920.000,00	39.569.200,00	2.350.800,00	94%
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	30.928.100,00	15.383.900,00	15.251.250,00	132.650,00	99%
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	19.690.000,00	9.540.000,00	9.315.000,00	225.000,00	98%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainya	75.000.000,00	58.009.100.,00	57.787.100,00	222.000,00	100%
II	*Program Pemberdayaan Sosial*	758.124.100,00	1.125.124.100,00	629.910.900,00	495.213.200,00	56%
1	Pengembangan Pengebangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	758.124.100,00	1.125.124.100,00	629.910.900,00	495.213.200,00	56%

Dipindai dengan CamScanner

a	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	308.155.700,00	675.155.700,00	375.112.000,00	300.043.700,00	56%
b	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	449.968.400,00	449.968.400,00	254.798.900,00	195.169.500,00	57%
III	Program Rehabilitasi Sosial	380.383.770,00	384.432.820,00	270.891.600,00	113.541.220,00	70%
1	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial*	380.383.770,00	384.432.820,00	270.891.600,00	113.541.220,00	70%
a	Penyediaan Permakanan	59.964.550,00	38.481.750,00	34.840.800,00	1.640.950,00	96%
b	Penyedian Sandang	27.177.900,00	20.902.900,00	11.902.900,00	9.000.000,00	57%
c	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.045.820,00	9.339.820,00	780.000,00	8.559.820,00	8%
d	Pemberian Bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	158.453.900,00	233.953.900,00	167.400.500,00	66.553.400,00	72%
e	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000,00	6.649.150,00	0,00	6.649.150,00	0%
c	Pemberian Layanan Rujukan	89.681.300,00	77.105.300,00	55.967.400,00	21.137.900,00	73%
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	266.545.847,00	238.481.997,00	217.080.380,00	21.401.617,00	91%
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	266.545.847,00	238.481.997,00	217.080.380,00	21.401.617,00	91%
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	151.458.500,00	123.394.650,00	102.059.280,00	21.335.370,00	83%
b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	115.087.347,00	115.087.347,00	115.021.100,00	66.247,00	100%
V	Program Penangaan Bencana	285.985.724,00	279.387.824,00	195.166.000,00	84.221.824,00	70%
1	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*	285.985.724,00	279.387.824,00	195.166.000,00	84.221.824,00	70%
a	Penyediaan Makan	167.667.824,00	167.667.824,00	120.574.000,00	47.093.824,00	72%
b	Penyedian Sandang	118.317.900,00	111.720.000,00	74.592.000,00	37.128.000,00	67%
TOTAL		6.355.395.711,00	6.210.348.807,00	4.857.533.825,00	1.352.814.982,00	78%

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Secara umum, kegiatan pada Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2024 dapat dikatakan **"Baik"** dengan nilai capaian sebesar **78%.** Pada tahun-tahun mendatang diharapkan pelaksanaan kinerja dapat terus dipertahankan.

Secara khusus, kendala/hambatan/masalah yang dihadapi akan diupayakan dicari pemecahannya sehingga dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Wali Kota Sibolga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2024 ini diperbuat sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2023 dan menjadi bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang.

Sibolga, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SIBOLGA,

Haslan Efendy, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700207 199009 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner